

BANK SYARIAH INDONESIA: TANTANGAN DAN STRATEGI DALAM MENDORONG PEREKONOMIAN NASIONAL

Achmad Sani Alhusain

19

Abstrak

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) sebagai lembaga keuangan syariah resmi beroperasi. Harapan besar terhadap BSI untuk menjadi salah satu instrumen pendorong ekonomi nasional sekaligus berkelas dunia harus dapat segera direalisasikan. Permasalahannya adalah apa saja yang perlu dilakukan BSI untuk dapat menjadi kontributor pendorong perekonomian nasional? Tulisan ini mengkaji tantangan dan strategi BSI dalam mendorong perekonomian nasional. Hasil analisis menyimpulkan bahwa BSI saat ini menjadi bank terbesar ke-7 di Indonesia dari sisi aset. Bursa saham juga memberikan indikator bahwa BSI mendapat respons positif dari pelaku usaha dan investor. Keberhasilan awal ini harus diikuti keberhasilan mencapai visi bank berkelas dunia dan mampu menjadi pendorong ekonomi nasional, antara lain melalui upaya transformasi bisnis yang terus menerus, menghasilkan produk jasa keuangan yang kompetitif, dan meningkatkan penetrasi fasilitas pembiayaan untuk UMKM. Untuk itu, DPR melalui fungsi pengawasan perlu terus mengawal dan mendorong perkembangan BSI agar mendukung perekonomian dan mampu mencapai visi yang dicita-citakannya tahun 2025.

Pendahuluan

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (selanjutnya disebut BSI) resmi beroperasi pada 1 Februari 2021. BSI merupakan bank syariah terbesar di Indonesia hasil penggabungan (merger) tiga bank syariah dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu: PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS). Terobosan kebijakan pemerintah untuk melakukan merger tiga bank syariah ini diharapkan dapat memberikan

pilihan lembaga keuangan baru bagi masyarakat sekaligus mampu mendorong perekonomian nasional.

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tanggal 12 Oktober 2020 mengumumkan secara resmi bahwa telah dimulai proses merger tiga bank umum syariah anak usaha bank BUMN dan ditargetkan selesai pada bulan Februari 2021. Beberapa pertimbangan yang mendorong proses merger disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir, antara lain pemerintah melihat



bahwa penetrasi perbankan syariah di Indonesia sangat jauh ketinggalan dibandingkan dengan bank konvensional. Di samping itu, pemerintah melihat peluang bahwa merger ini bisa membuktikan sebagai negara dengan mayoritas muslim punya bank syariah kuat secara fundamental. Bahkan, Presiden Joko Widodo mempertegas lagi bahwa pembentukan bank syariah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat industri keuangan syariah di Indonesia (cnbcindonesia.com, 26 Januari 2021).

Salah satu visi yang diemban BSI adalah menjadi bank syariah berskala dunia, yaitu target untuk masuk dalam peringkat 10 besar bank syariah dunia dengan nilai kapitalisasi besar pada 2025. Pencapaian target tersebut menjadi tantangan yang besar karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset perbankan syariah, mencakup bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) per November 2020 hanya 3,97% dari total aset bank umum. Selain itu, nilai pembiayaan Syariah BUS dan UUS baru 2,49% dari total pembiayaan bank umum. Tingkat inklusi keuangan syariah pada 2019 pun turun 200 bps dari semula 11,1% pada 2016 menjadi tinggal 9,10%. Sebaliknya, tingkat inklusi keuangan perbankan konvensional justru meningkat dari 65,6% pada 2016 menjadi 75,28% pada 2019 (Bisnis Indonesia, 2 Februari 2021).

Berdasarkan pertimbangan merger dan kondisi aktual yang disampaikan OJK tersebut, maka permasalahan yang muncul adalah apakah BSI dapat menarik

perhatian masyarakat sebagai alternatif lembaga keuangan baru? Dan apa saja hal yang perlu dilakukan BSI untuk dapat menjadi kontributor pendorong perekonomian nasional? Tulisan ini bertujuan mengkaji tantangan dan strategi BSI mendorong peningkatan perekonomian nasional dan menjadi bank berskala dunia.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk: Hasil Merger Tiga Bank Syariah

Tujuan penggabungan bank syariah yaitu untuk mendorong bank syariah lebih besar sehingga dapat masuk ke pasar global dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, *merger* bank syariah dinilai dapat lebih efisien dalam penggalangan dana, operasional, dan belanja. Melalui *merger* bank syariah ini diharapkan perbankan syariah terus tumbuh dan menjadi energi baru untuk ekonomi nasional dan akan menjadi bank BUMN yang sejajar dengan bank BUMN lainnya sehingga bermanfaat dari sisi kebijakan dan transformasi bank (Republika, 13 Oktober 2020).

Tercatat per Desember 2020 aset BSI sudah mencapai Rp239,56 triliun (lihat Tabel 1). Aset sebesar itu menempatkan BSI sebagai bank terbesar ke-7 di Indonesia dari sisi aset. Aset bank berkode saham BRIS itu berada di bawah PT Bank CIMB Niaga Tbk (Rp281,7 triliun) dan di atas PT Bank Panin Tbk (Rp216,59 triliun) per September 2020 (Bisnis Indonesia, 2 Februari 2021). Aset yang sangat besar ini dapat mengungkit kemampuan lebih besar dalam mendukung pembiayaan

Tabel 1. Kinerja 3 Bank Syariah BUMN dan Hasil Merger BSI
(Rp Triliun)

	BNI Syariah		BRI Syariah		Mandiri Syariah		Bank Syariah Indonesia
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Per Desember 2020
Total Aset	44,98	55,01	43,12	57,70	112,29	126,85	239,56
Pembiayaan	43,77	47,97	34,12	49,34	99,81	112,58	209,98
Dana Pihak Ketiga	32,58	33,05	27,38	40,00	75,54	83,43	156,51
Laba	0,6	0,5	0,074	0,25	1,28	1,43	2,19

Sumber : Paparan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. *Bisnis Indonesia*, 2 Februari 2021.

ekonomi. Di samping itu, diharapkan dapat menjadi akselerator bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Setelah BSI diresmikan operasionalnya oleh Presiden Joko Widodo, harga saham BRIS pada sesi perdagangan kemarin ditutup menguat 14,8% ke level Rp2.800 per unit dan membentuk kapitalisasi pasar bank tersebut sebesar Rp27,4 triliun. Kapitalisasi BRIS merupakan yang tertinggi di kelompok bank syariah. Sejak pembukaan perdagangan saham tahun ini, saham BRIS sudah mencatatkan kenaikan 24,4% (*Bisnis Indonesia*, 2 Februari 2021). Hal ini menunjukkan bahwa hadirnya BSI sebagai hasil merger 3 Bank Syariah BUMN ternyata mendapat sambutan baik dari masyarakat, baik pelaku usaha maupun investor sebagaimana dicatat oleh bursa saham.

Kalangan pengusaha pun memberikan komentar yang positif terhadap BSI. Direktur PT Anugerah Mega Investama Hans Kwee optimistis bahwa eksistensi bank syariah baru tersebut akan berkontribusi positif terhadap proses penguatan ekonomi Indonesia yang tengah diterjang pandemi.

Ditegaskan bahwa BSI akan mendapat *size* yang sangat besar, baik dari sisi aset, kantor cabang, maupun sumber daya manusia yang sangat berkualitas. Banyak hal yang BSI dapat lakukan untuk pemulihan ekonomi nasional. Potensi penggalangan dana dari BSI akan lebih baik dengan saluran global yang mumpuni untuk menggalang dana murah nonkovensional guna membiayai berbagai proyek strategis (*Bisnis Indonesia*, 1 Februari 2021).

Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Ventje Rahardjo berharap BSI dapat menjadi penggerak utama dalam literasi pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. BSI dapat berperan besar dalam meningkatkan pengembangan ekosistem halal yang sudah dirintis oleh ketiga bank syariah sebelum *merger*. Ventje juga meyakini bahwa BSI memiliki kapasitas memperkuat kapabilitas dan jangkauan pembiayaan *wholesale*, baik di dalam maupun luar negeri (*Republika*, 1 Februari 2021).

Sementara itu, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi memastikan bahwa

pilar-pilar yang mendukung BSI dalam memberikan produk yang bersaing didukung dengan layanan prima, yaitu produk yang inovatif, jaringan yang luas, SDM yang kompeten, sistem TI yang andal, serta permodalan yang kuat (Republika, 1 Februari 2021). Berdasarkan capaian awal dan optimisme dari berbagai pihak maka kehadiran BSI menjadi sebuah harapan yang bisa memberikan kontribusi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Merger ini juga diharapkan mampu meningkatkan pangsa pasar ekonomi syariah di Indonesia yang saat ini baru mencapai 9,68% dan kontribusi perbankan syariah baru sekitar 6,81%. Hal ini sangat ironis mengingat populasi muslim mencapai sekitar 229 juta jiwa dari total 270 juta penduduk Indonesia, sehingga sudah saatnya potensi ekonomi dan keuangan syariah perlu terus ditingkatkan agar tumbuh dan berkembang menjadi besar.

Tantangan dan Strategi BSI dalam Mendorong Perekonomian Nasional

Presiden Joko Widodo dalam pidato peresmian BSI di Istana Negara berharap agar lembaga keuangan syariah ini dapat turut berkontribusi lebih luas dalam pengembangan ekonomi syariah demi kesejahteraan seluruh rakyat. Presiden menilai bahwa perbankan syariah mampu bertahan pada masa pandemi Covid-19. Buktinya, pertumbuhan kinerjanya lebih unggul daripada perbankan konvensional pada tahun lalu. Meskipun pangsa pasar industri keuangan syariah masih kecil atau

tertinggal dibandingkan dengan bank konvensional di tanah air, kondisi tersebut justru menjadi amunisi bank syariah pada masa mendatang (Bisnis Indonesia, 2 Februari 2021). Pernyataan Presiden tersebut diperkuat oleh data OJK, dimana sampai dengan akhir 2020, penyaluran pembiayaan bank umum syariah di Indonesia tumbuh 9,5% secara tahunan. Pertumbuhan ini di atas pertumbuhan pembiayaan industri perbankan nasional yang minus 2,41% (Kompas, 1 Februari 2021). Oleh karena itu, lahirnya lembaga keuangan baru hasil *merger* ini dapat memperkaya pilihan produk dan jasa keuangan syariah bagi masyarakat.

Tantangan besar yang membentang di depan mata ini sudah barang tentu memaksa manajemen BSI untuk bertransformasi dan menetapkan beberapa strategi, mulai dari perbaikan proses bisnis, penguatan manajemen risiko, penguatan sumber daya manusia (SDM), hingga penguatan teknologi digital. Peneliti ekonomi Syariah Institute for Development of Economics and Financing (INDEF) Fauziah Rizki Yuniarti mengingatkan bahwa preferensi masyarakat memilih layanan berbasis syariah atau konvensional tidak sepenuhnya berlandaskan keyakinan agama. Akses pelayanan keuangan dan produk yang berbasis teknologi yang menjadi faktor utama (Kompas, 2 Februari 2021).

Kepala OJK Institute Agus Sugiarto juga mengingatkan faktor lainnya yaitu masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia yang berada pada angka 8,93% menjadi tantangan besar mengingat hanya sekitar 9

orang dari setiap 100 penduduk yang sudah memahami produk keuangan syariah (Bisnis Indonesia, 1 Februari 2021). Tidak kalah pentingnya bahwa proses adaptasi budaya kerja setelah penggabungan juga tidak mudah. Manajemen BSI perlu memastikan proses integrasi berjalan mulus, tanpa mengorbankan pengelolaan SDM dan sistem *core banking* (Bisnis Indonesia, 2 Februari 2021). Dengan melakukan transformasi menyeluruh maka pemerintah diharapkan dapat mendorong BSI untuk berperan aktif dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah dan memberikan manfaat sosial seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia.

Menghadapi tantangan yang besar tersebut, Direktur Utama BSI Hery Gunardi berkomitmen bahwa BSI akan menjadi lembaga perbankan dengan strategi menawarkan produk kompetitif guna memenuhi kebutuhan setiap lini masyarakat. Di samping itu, BSI diarahkan menjadi bank yang modern tetapi tetap setia pada prinsip syariah. Upaya meningkatkan pangsa pasar industri jasa keuangan syariah nasional akan dilakukan BSI melalui diversifikasi lini bisnis syariah yang lebih luas, mencakup segmen UMKM, ritel, dan konsumen, serta *wholesale* dengan produk yang inovatif, serta melakukan pengembangan bisnis internasional seperti global sukuk (Bisnis Indonesia, 2 Februari 2021).

Secara khusus, Hery Gunardi menegaskan, BSI akan terus menjunjung komitmen bagi para pelaku UMKM yang tersebar di berbagai daerah di tanah air. BSI akan membangun sentra UMKM di kota dan kabupaten serta melakukan penyaluran berbasis komunitas dan

lingkungan masjid. BSI juga akan melakukan penyaluran pembiayaan ke UMKM binaan Kementerian Koperasi dan UKM ataupun lembaga lainnya (Republika, 1 Februari 2021). Komitmen ini menepis kekhawatiran bahwa sebagai BSI yang memiliki nilai aset besar dan berorientasi menjadi bank syariah berkelas dunia berpotensi meninggalkan dukungan fasilitasi untuk UMKM.

Penutup

BSI sebagai hasil merger 3 (tiga) bank syariah BUMN secara resmi beroperasi. BSI menjadi bank terbesar ke-7 di Indonesia berdasarkan nilai aset yang dimiliki. Pada awal beroperasi sudah mampu menjadi magnet pelaku usaha dan investor di bursa saham yang ditunjukkan dengan kenaikan nilai saham yang signifikan. Pelaku usaha pun memberikan penilaian positif dan menaruh harapan yang besar akan kiprah BSI sebagai lembaga keuangan yang dapat menjadi penggerak ekonomi nasional.

Keberhasilan awal ini harus diikuti dengan keberhasilan menjawab tantangan untuk mencapai visi kelas dunia dan mampu menjadi pendorong ekonomi nasional, antara lain melalui upaya transformasi bisnis yang terus menerus, menghasilkan produk jasa keuangan yang kompetitif dan meningkatkan penetrasi fasilitasi pembiayaan untuk UMKM. Untuk itu, DPR melalui fungsi pengawasan perlu terus mengawal dan mendorong perkembangan BSI berperan dalam perekonomian dan mampu mencapai visi yang dicita-citakannya pada tahun 2025.

Referensi

Agus Sugiarto, "BSI dan Ekosistem Syariah", *Bisnis Indonesia*, 1 Februari 2021, hal. 2.

"Amunisi Baru Pemulihan Ekonomi", *Bisnis Indonesia*, 1 Februari 2021, hal. 3.

"BSI Bisa Bantu Pulihkan Ekonomi", *Republika*, 1 Februari 2021, hal. 7.

"BSI Perkuat Ekosistem Industri Halal", *Kompas*, 2 Februari 2021, hal. 16.

"Bank Syariah Indonesia Beroperasi", *Republika*, 1 Februari 2021, hal. 1.

"Bank Syariah Terbesar RI Hadir, Ini Sejumlah Fakta Menariknya", 26 Januari 2021, (<https://www.cnbcindonesia.com/>

[arket/20210126095842-17-218697/bank-syariah-terbesar-ri-hadir-ini-sejumlah-fakta-menariknya](https://www.cnbcindonesia.com/market/20210126095842-17-218697/bank-syariah-terbesar-ri-hadir-ini-sejumlah-fakta-menariknya)), diakses 3 Februari 2021.

"Inklusif untuk Semua", *Kompas*, 1 Februari 2021, hal. 9.

"Ketiban Berkah Bank Syariah", *Bisnis Indonesia*, 2 Februari 2021, hal. 16.

"Misi Besar Bank Syariah: Bank Syariah Indonesia", *Bisnis Indonesia*, 2 Februari 2021, hal. 1.

Muhammad Nursyamsi dan Lida Puspaningtyas, "Merger Bank Syariah BUMN Dimulai", *Republika*, 13 Oktober 2020, hal. 1.



Achmad Sani Alhusain
achmad.alhusain@dpr.go.id

Achmad Sani Alhusain, SE, MA., menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran pada tahun 1998 dan pendidikan S2 Master of Art in Economic Policy di Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Atlanta, USA, pada tahun 2002. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Kebijakan Publik pada bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: "Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kreatif" (2015), "Kebijakan Pemerataan Pembangunan Daerah di Indonesia" (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.